

Pramono Isyaratkan Tersangka Baru Bansos

DI sisi lain, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) R. Widyo Pramono mengatakan sebentar lagi akan ada tersangka baru dalam kasus dana bantuan sosial di Sumatera Utara. Dirinya menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan terkait kasus tersebut. "Ya, sebentar lagi ada tersangka baru. Saat ini sedang penyidikan di sana. Jaksa-jaksa saya sudah turun melakukan penyidikan kasus tersebut," ujarnya ditemui di Ballroom Sanur Paradise Plaza, kemarin ■

► Baca **Pramono...** Hal 31

Tolak Alasan Ketakutan dan Pentingnya Ketegasan

■ Kalau memang berniat sungguh-sungguh menyerap anggaran dengan semestinya, tidak perlu takut menyerap anggaran yang ada (APBN/APBD) asal penggunaannya sudah benar



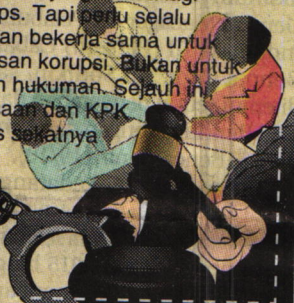
■ Ketakutan menyerap anggaran itu muncul karena ada niat untuk menguntungkan orang lain dan diri sendiri, sehingga waswas diperiksa aparat penegak hukum



■ Untuk memberantas korupsi, penyidik, penyidik dan auditor agar menghilangkan urat takutnya. Jangan sampai takut memberantas korupsi



■ Aparat seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, BPK, jangan ada lagi ada ego korps. Tapi perlu selalu koordinasi dan bekerja sama untuk pemberantasan korupsi. Bukan untuk meringankan hukuman. Setelah ini, Polri, Kejaksaan dan KPK semakin tipis sekatnya untuk saling bekerjasama



GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

Optimistis karena Jaksa Tahan Banting

■ PRAMONO...

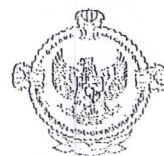
Sambungan dari hal 21

Saat ditanya calon tersangka baru itu berasal dari partai politik? Pramono terkesan enggan menjawab. Dia hanya menegaskan bahwa kasus Bansos Sumut itu ditangani Tim Satuan Tugas (Satgas) Khusus. Dia terkesan optimistis den-

gan tim jaksa dalam kasus ini. "Saat ini tim tersebut sedang bergerilya melakukan penyidikan. Para jaksa yang menyidik kasus itu terkenal tahan banting di Sumut," paparnya.

Imbuh Pramono, untuk menelusuri ke mana saja dana bansos itu mengalir, pihaknya bekerja sama dengan institusi Polri, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan BPKP.

Seperti diketahui, saat ini tersangka kasus dana bansos itu di antaranya Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti serta pengacara kondang OC Kaligis. Yang terbaru adalah mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Patrice Rio Capella. Capella ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Oktober 2015 oleh KPK. (ken/pit)

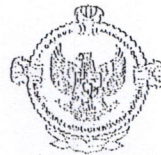


AGUNG BAYU/BALI EXPRESS

BIDIK YANG LAIN : Kabareskrim Komjen Anang Iskandar kemarin paparkan kemungkinan tersangka lain.

Edisi : Selasa, 26 Oktober 2015

Hal. : 31



Kabareskrim akan Jerat Tersangka Lagi

Buntut Penuntasan Kasus BP3TKI

DENPASAR – Kasus korupsi BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), mendapatkan tanggapan dari Mabes Polri. Kasus yang terkesan menyela-
amatkan penerima hasil korupsi hingga mencapai Rp 1,5 miliar, yaitu Wahyudi Matodang alias Dodik ini ditanggapi serius Kabareskrim Komjen Anang Iskandar.

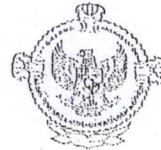
Dia bahkan memastikan bahwa kalau memang nanti sesuai fakta persidangan hasilnya memastikan terlibat, Dodik akan jadi tersangka. Anang mengatakan memang kasus BP3TKI, ada kasus korupsi pengadaan lahan.

“Dua sudah disidang. Kemudian dua tersangka kami alihkan penanganannya ke Polda Bali. Kami menanganinya dengan serius kasus ini,” jelas mantan Kalakhar BNN, ini kemarin dalam acara Pelatihan Bersama Kapasitas Penegak Hukum dalam penanganan Tipikor, yang diselenggarakan oleh KPK bersama dengan Mabes Polri, Kejaksaan, PPATK, BPKP dan BPK RI di Sanur Paradise Plaza, Sanur, Denpasar.

Dia memastikan bahwa, sementara yang bisa ditetapkan menjadi tersangka lebih awal adalah 4 orang. Dua sudah sidang, dua lagi masih ditangani. “Memang ada peran dengan nama Wahyudi Matodang alias Dodik, namun kami tunggu fakta persidangannya. Jika memang dalam fakta persidangan terbukti ada aliran dana, pasti kami jadikan tersangka,” lanjutnya. “Jadi kami menunggu fakta persidangan, setelah Dodik jadi tersangka,” janjinya.

Seperti di berita sebelumnya, ada fakta persidangan yang unik kasus BNP3TKI. Kasus ini ditangani oleh Mabes Polri. Namun, ada nama Dodik yang belum terjerat hukum. Dia ikut dari awal pengadaan lahan bahkan saat nego di rumah makan Tekko sampai akhir mengambil dana, sempat memerintahkan terdakwa Prio dan tersangka Trusdy mengambil dana Rp 750 juta sebanyak dua kali.

dalam dakwaan dijelaskan, bahwa tahun 2013, dalam DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) BP3TKI terdapat anggaran beli tanah untuk kantor. Pagu anggaran Rp 7,5 m. Untuk pelaksana kegiatan. Selain beberapa nama sebelumnya, ada nama muncul juga sejumlah pejabat. (art/pit)



KPU Minta Dana Hibah Digelontorkan 2016

SINGARAJA - Meski sepekan terakhir, pemerintah telah menegaskan sikapnya akan mengkomodir dana Pilbup 2017 dalam tahun anggaran, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buleleng masih berharap pemerintah bisa menggelontorkan dana hibah Pemilihan Bupati (Pilbup) Buleleng 2017, pada tahun anggaran 2016. KPU masih melihat celah pemerintah bisa mengalokasikan seluruh biaya Pilbup pada tahun anggaran 2017.

Ketua KPU Buleleng Gede Suardana mengatakan, pihaknya terus mendorong Pemkab Buleleng bisa mencairkan seluruh biaya pilkada pada tahun anggaran 2016, melalui mekanisme hibah. Meski pada akhirnya ada sejumlah dana yang digunakan pada tahun 2017.

Sebagai dasar pencairan hibah anggaran pilkada, KPU juga telah memberikan kajian kepada DPRD Buleleng tentang skema anggaran Pilbup 2017. Skema itu diharapkan dibahas oleh Badan Anggaran. Rencananya KPU juga akan menyerahkan skema yang sama kepada pemerintah kabupaten, agar bisa dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Kami berharap DPRD dan Pemkab Buleleng memahami dengan baik dan jelas pentingnya anggaran Pilbup dicairkan pada tahun 2016," ujar Gede yang ditemui di Gedung DPRD Buleleng, Senin (19/10) kemarin.

Disinggung soal pola pertanggungjawaban, KPU menyatakan pelaporan penggunaan dana hibah pemilihan, dilakukan paling lambat tiga bulan setelah seluruh tahapan usai. Artinya pelaporan akan disampaikan KPU Buleleng, selambat-lambatnya pada bulan Agustus 2017.

Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna yang ditemui terpisah, menyatakan pihaknya belum menentukan sikap terkait permintaan KPU. Menurut Supriatna dewan sebenarnya sudah melakukan pembahasan, melalui Komisi I DPRD Buleleng, dua pekan lalu.

"Nanti tunggu rapat Badan Anggaran dengan TAPD dulu. Nanti kami juga akan mengundang KPU, Bawaslu, kepolisian, TNI, serta pihak-pihak yang terlibat. Supaya pembahasannya komprehensif dan mendetail," kata Supriatna.

Disisi lain, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Buleleng, Bimantara, tetap meminta agar dana Pilbup Buleleng 2017, dicairkan dalam dua tahun anggaran. "Regulasi daerah sesuai pedoman pengelolaan keuangan daerah, ya memang harus dipisah. Tahapan 2016, dibiayai tahun anggaran 2016. Tahapan 2017, dibiayai tahun anggaran 2017. Karena aturan satu tahun anggaran, pengertiannya itu mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember," tegasnya.

Sekadar diketahui, anggaran Pilbup Buleleng 2017, kini memang masih tarik ulur dalam pembahasan tahun anggaran 2016, antara TAPD dengan Banggar DPRD Buleleng. Pemerintah dibuat bingung, karena anggaran pemilihan terlampaui besar, mencapai Rp 70 miliar atau tiga kali lipat dari anggaran Pilbup Buleleng 2012.

KPU Buleleng mendesak agar seluruh anggaran Pilbup dicairkan di tahun anggaran 2017, karena pada Januari 2017, cukup banyak anggaran yang harus dicairkan. Mulai honorarium lembaga *ad hoc*, hingga pembuatan tempat pemungutan suara. Permintaan itu diajukan, karena belajar pada tahun anggaran sebelumnya, dana pemerintahan baru bisa cair pada bulan Maret dan April, setelah melalui proses verifikasi di provinsi. (eps/gup)



Mantan Rektor Undiksha Bersaksi

Di PTUN Terungkap Berkas Soal Ternyata Masih di Singaraja

DENPASAR - Mantan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Prof. Dr. Nyoman Sudiana akhirnya dihadirkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Denpasar, Senin kemarin (19/10). Sudiana bersaksi terkait kasus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Dosen Undiksha tahun 2014. Selain itu, saksi lainnya pihak yang mewakili Dirjen Dikti, serta Komisi Informasi Bali.

Ini merupakan sidang lanjutan keberatan Undiksha atas putusan Komisi Informasi Bali yang telah memenangkan Gede Kamajaya sebagai pihak CPNS Dosen Undiksha tahun 2014 yang meminta kejelasan nilai Tes Kompetensi Bidang (TKB) yang tidak diumumkan oleh Undiksha secara transparan.

Dalam sidang tersebut Sudiana sebagai Rektor Undiksha pada tahun 2014 tetap bersikukuh bahwa semua mekanisme dan hasil akhir dari pengadaan CPNS tersebut merupakan kewenangan dari pusat. Yakni, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS. "Kami tidak ada kewenangan untuk membuka nilai itu kepada Gede Kamajaya," terangnya.

Dalam kesaksiannya, Nyoman Sudiana juga mengatakan, bahwa nilai yang dikirim ke Panselnas adalah nilai jadi, alias setelah diolah di Undiksha. Dipertajam lagi oleh Majelis Hakim, di mana soal dan

kunci jawaban serta hasil TKB peserta CPNS Dosen Undiksha, Sudiana menjawab masih ada di Singaraja yakni di pengelola data dan informasi Undiksha. "Untuk berkas soal dan kunci jawaban, serta hasil penilaian ada di Undiksha," jawabnya.

Sementara itu, pihak Gede Kamajaya sendiri menilai bahwa pernyataan mantan rektor Undiksha Nyoman Sudiana sudah cukup memberikan bukti, bahwa nilai, soal, kunci jawaban, serta hasil evaluasi panitia masih berada di Undiksha. Padahal Gede Kamajaya sendiri meminta kejelasan mengenai nilai, soal, kunci jawaban, serta hasil evaluasi panitia lokal.

"Ini kan ranahnya panitia lokal, apa kaitannya dengan pusat. Kan saya meminta transparansi saja dari Undiksha yang selama ini kami tidak pernah diberikan atau diperlihatkan," ujarnya.

Menurut Gede Kamajaya, kesaksian dari pada mantan Rektor Undiksha dan Dirjen Dikti pun sudah sangat kontradiktif dengan apa yang diatur dalam UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa dokumen tersebut bukan dokumen yang dirahasiakan lagi.

"Saya contohkan, misalnya ketika siswa SMA mengikuti ujian nasional, jelas soal sebelum dikerjakan itu menjadi dokumen rahasia negara. Tetapi kalau sudah dikerjakan, soal itu tidak lagi menjadi dokumen rahasia. Demikian juga dengan nilai, semua berhak meminta transparansi. Lah lalu kenapa Undiksha merahasiakan itu semua dan menganggap itu bukan wewenang?" tegas



Sambutan - - -



HENDRI HARLIWAN/RADAR BALI

TAK TRANSPARAN: Mantan Rektor Undiksha Singaraja Prof. Nyoman Sudiana, saat bersaksi di PTUN Denpasar, kemarin.

Kamajaya setengah bertanya.

Lain lagi dengan pihak Komisi Informasi Bali yang juga ikut bersaksi, secara jelas menyebutkan, bahwa informasi yang diminta Gede Ka-

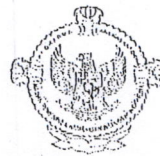
majaya adalah sifatnya bukan rahasia, melainkan informasi yang berhak diterima oleh peserta CPNS Dosen Undiksha. "Kami katakan informasi yang diminta Gede Kamajaya

adalah informasi yang berhak diterima oleh peserta CPNS Undiksha," ujar Ketua Komisi Informasi Bali Nyoman Gede Lagawa Parta, ketika bersaksi di PTTUN.

Seperti berita sebelumnya, Gede Kamajaya merupakan peserta CPNS Dosen Sosiologi Undiksha tahun 2014 yang berkeberatan dengan hasil dari Undiksha. Padahal nilainya lebih besar dan justru ada di Fakultas lain yang lebih kecil nilainya dinyatakan lulus. Gede Kamajaya pun meminta soal, kunci jawabannya, beserta rincian nilai TKB yang ia lakukan.

Tetapi ditolak Undiksha dengan alasan bukan wewenang Undiksha untuk membuka. Gede Kamajaya pun akhirnya menang di persidangan Komisi Informasi Bali, yang akhirnya Undiksha banding ke PTTUN Denpasar, yang berkeberatan dengan hasil putusan Komisi Informasi Bali. (hen/rid)

Radar Bali



Takut Pemeriksaan Ruki Sebut Bullshit



SINDIR PEJABAT :
Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki (kiri) menyampaikan sindiran tentang alasan ketakutan menyerap anggaran yang dinilai omong kosong, di Sanur Paradise Plaza, kemarin.

Edisi : Minggu, 18 Oktober 2015
Hal. : 21 dan 31

Radar Bali



penerapan sanksi yang tegas sebagai upaya menimbulkan efek jera (*deterrent effect*). Demi meningkatkan kapasitas dan sinergi itu, KPK menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Bersama Aparat Penegak Hukum 2015 yang akan berlangsung selama 5 hari dimulai pada 19 hingga 23 Oktober 2015.

Ruki menjelaskan kegiatan tersebut dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian keuangan negara. Khususnya di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Melalui sinergi tersebut diharapkan dapat terwujud kerja sama yang lebih efektif di antara instansi penegak hukum, auditor BPK, dan BPKP dalam pemberantasan korupsi.

"Sinergi dan kerja sama ini mutlak dilaksanakan mengingat

banyak kalangan yang menyatakan pemberantasan korupsi di negeri ini belum berjalan maksimal. Kalau tidak maka semua kasus korupsi hanya akan berakhir di P-19 secepat apa pun oknum aparat penegak hukum tersebut," papar pria kelahiran Rangkasbitung, Lebak, 18 Mei 1946 silam ini.

Imbuh Ruki, kegiatan tersebut merupakan realisasi dari fungsi mekanisme pemicu (*trigger mechanism*) yang dimiliki KPK dalam rangka mempercepat proses penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani aparat penegak hukum lainnya. Yakni, kepolisian dan kejaksaan. "Pelatihan ini menjadi amat penting untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan perkara sejak di tingkat penyidikan, penyidikan, penuntutan

hingga penyelamatan aset negara hasil tindak pidana korupsi," tegasnya.

Dalam pelatihan bersama selama lima hari itu, para peserta akan dibekali 13 materi dari para narasumber yang kompeten dengan format ceramah, diskusi, dan tanya-jawab. "Ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan teknis terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi," sambung Ruki.

Sebelumnya, kegiatan serupa telah digelar di dua kota. Yakni di Pekanbaru, Riau, pada 24-28 Agustus 2015 untuk wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Di Manado pada 14-18 September 2015 untuk wilayah Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara. Tahun lalu, KPK menggelar kegiatan serupa di Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku Utara dan Kalimantan Selatan. (art/ken/pit)

Edisi : Minggu, 18 Oktober 2015

Hal. : 31